

Perlawanan WALHI terhadap Rencana Pembangunan PLTN di Bangka Tengah: Strategi Politik Ekstra-Parlementer dalam Advokasi Lingkungan

Hijriyanto¹, Revana², Elza Putri³, Marta Arya⁴

Universitas Bangka Belitung^{1,2,3,4}

*Correspondence author: hijriyan423@gmail.com

Abstract. This study examines the resistance of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) against the planned construction of a Nuclear Power Plant (PLTN) in Central Bangka through an extra-parliamentary political perspective. The background of this study is the emergence of public resistance to development projects that are considered to have the potential to cause ecological, social, and economic risks, as well as minimal public participation in the policy-making process. This study aims to analyze the forms of WALHI's resistance and the extra-parliamentary political strategies constructed and practiced in environmental advocacy. The method used is a qualitative approach with a case study type, through data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. The results show that WALHI's resistance is carried out through policy advocacy, public campaigns, community mobilization, and the use of mass media and social media in building public opinion. In addition, the extra-parliamentary political strategies implemented include framing environmental issues, producing counter-knowledge (counter-expertise), strengthening grassroots movements, and political pressure on the government and corporations. These findings indicate that WALHI plays a role as a political actor outside parliament that is able to influence public policy and fight for environmental justice. Thus, extra-parliamentary movements have become an important instrument in strengthening civil society participation in democracy and oversight of development policies.

Keywords: WALHI; extra-parliamentary politics; environmental advocacy; nuclear power plants; social movements.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlawanan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Tengah melalui perspektif politik ekstra-parlementer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari munculnya resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko ekologis, sosial, dan ekonomi, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlawanan WALHI serta strategi politik ekstra-parlementer yang dikonstruksi dan dipraktikkan dalam advokasi lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan WALHI dilakukan melalui advokasi kebijakan, kampanye publik, mobilisasi masyarakat, serta pemanfaatan media massa dan media sosial dalam membangun opini publik. Selain itu, strategi politik ekstra-parlementer yang diterapkan mencakup framing isu lingkungan, produksi pengetahuan tandingan (*counter-expertise*), penguatan gerakan akar rumput, serta tekanan politik terhadap pemerintah dan korporasi. Temuan ini menunjukkan bahwa WALHI berperan sebagai aktor politik di luar parlemen yang mampu memengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan keadilan lingkungan. Dengan demikian, gerakan ekstra-parlementer menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam demokrasi dan pengawasan terhadap kebijakan pembangunan.

Kata kunci: WALHI; politik ekstra-parlementer; advokasi lingkungan; PLTN; gerakan sosial.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan kawasan industri acapkali diposisikan sebagai simbol kemajuan ekonomi daerah (SISTA, 2024). Di berbagai wilayah Indonesia, proyek-proyek strategis nasional (PSN) didorong sebagai upaya meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi (Muhammad et al., 2025; Wardana & Darmawardana, 2024). Namun, pembangunan tersebut acapkali menjadi perdebatan dan resistensi baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang terorganisir, terutama proyek ketika tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan bagi warga terdampak.

Satu diantaranya isu yang marak diperdebat dan mendapatkan resistensi adalah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Tengah. Proyek PLTN menghadapi proses yang kompleks dan mengandung banyak ketidakpastian (Kanugraha, 2025). Selain itu, minimnya sosialisasi dan transparansi, ancaman ekosistem laut serta dampak jangka panjang menjadi hulu gerakan perlawanan penolakan proyek tersebut, baik secara individu, kelompok yang terorganisir, maupun organisasi masyarakat sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Walhi menjadi bagian dari organisasi masyarakat sipil memiliki sejarah panjang dalam advokasi lingkungan di Indonesia. Walhi merupakan forum masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok pecinta alam, dan kelompok swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan (Liputan6, 2024). Dalam berbagai kasus, Walhi konsisten memanfaatkan strategi politik ekstra parlementer sebagai medium memperjuangkan hak masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan yang tidak berpihak terhadap lingkungan.

Gerakan Ekstra parlementer hadir sebagai jawab atas lemahnya fungsi legislatif dalam sistem politik yang menganut konsep trias politica seperti Indonesia. Ekstra parlementer dimaknai sebagai upaya mencapai, menyuarakan, atau mendapatkan otonomi sesuai kebutuhan dan tuntutan di luar lingkup parlemen (Rizqi, 2024). Selain itu, ekstra parlementer dapat dimaknai sebagai bagian dari partisipasi politik seperti yang dilakukan oleh Walhi. Huntington et al., (1994) memaknai partisipasi politik sebagai bentuk untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh warga negara. Hal tersebut dilakukan secara sukarela dan bukan gerakan yang dibangun dari negara atau partai yang berkuasa.

Menempatkan politik ekstra parlementer sebagai pilihan strategi menunjukkan bahwa gerakan kolektif yang dibangun masyarakat sipil tidak selalu bergantung pada jalur formal di lembaga legislatif (Al-Hamdi, 2022). Gerakan keadilan lingkungan, pendidikan dan kampanye, serta pendampingan masyarakat menjadi sarana untuk membangun gelombang tekanan politik (Zubaedi, 2016). Oleh karena itu, pendekatan tersebut acapkali efektif dalam menghimpun perhatian publik sekaligus menekan pengambil kebijakan membuka ruang dialog yang inklusif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa gerakan lingkungan semata-mata bukan hanya respon spontan terhadap proyek pembangunan, melainkan bagian integral demokrasi yang menuntut akuntabilitas negara. Hadirnya Walhi dalam isu rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran vital sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal

tersebut secara khusus terjadi ketika dalam proses pengambilan kebijakan tidak dilakukan secara inklusif, seperti melibatkan masyarakat terdampak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawan et al., (2024) mengungkapkan gerakan sosial memainkan peran vital dalam mempromosikan kebijakan energi terbarukan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2023) mengurai tentang kontestasi wacana risiko nuklir dan minimnya kepercayaan terhadap pemerintah yang menjadi hulu gerakan penolakan.

Lebih lanjut, penelitian tentang Walhi memang telah banyak dilakukan yang sebagian besar menempatkan dalam konteks gerakan lingkungan pada level nasional seperti isu agraria. Namun, masih relatif terbatas yang secara spesifik mengkaji tentang bagaimana Walhi mengkonstruksi dan mengoperasikan strategi politik ekstra parlementer pada isu nuklir dan karakteristik sosio-ekologis di Bangka Tengah serta minimnya kajian yang menempatkan strategi ekstra parlementer sebagai arena produksi kekuatan politik yang mampu mempengaruhi wacana pembangunan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyudi et al., (2021) mengkaji keterlibatan Walhi sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) melalui konsep kesempatan politik (*political opportunity*) dalam mengangkat isu agraria.

Kondisi yang telah dipaparkan tersebut, mengarahkan penelitian ini pada bagaimana Walhi mengkonstruksi dan mempraktikkan strategi ekstra parlementer dalam menghadapi rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah. Penelitian ini semata-mata tidak hanya menginventarisasi bentuk aksi, melainkan juga mengeksplorasi proses produksi pengetahuan, pembentukan jaringan, dan cara organisasi membangun legitimasi di hadapan masyarakat. Dengan berfokus pada konteks lokal di Bangka Tengah, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang lebih spesifik tentang gerakan lingkungan mengangkat isu kawasan pesisir dan kepulauan yang belum banyak mendapatkan perhatian dari penelitian sebelumnya.

Berangkat dari uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Walhi terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah dan bagaimana strategi politik ekstra-parlementer yang dikonstruksi dan dipraktikkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam advokasi penolakan pembangunan PLTN di Bangka Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Perlawanan WALHI terhadap Rencana Pembangunan PLTN di Bangka Tengah: Strategi Politik Ekstra-Parlementer dalam Advokasi Lingkungan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam tentang perlawanan Walhi terhadap wacana pembangunan PLTN di Bangka Tengah. Menurut Creswell dalam (Safarudin et al., 2023), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dalam bidang pendidikan yang menekankan pada pandangan dan pengalaman para partisipan atau informan.

Lebih lanjut, studi kasus dapat dipahami sebagai suatu bentuk eksplorasi mendalam terhadap sistem yang terikat atau terhadap satu maupun beberapa kasus yang dikaji dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini dilakukan melalui

pengumpulan data yang komprehensif serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, studi kasus merupakan metode penelitian di mana peneliti menelaah secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam batasan waktu dan konteks tertentu dalam batasan waktu dan konteks tertentu, seperti program, proses, institusi, atau kelompok social, dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data secara rinci dan intensif (Assyakurrohim et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder ditemukan dari kajian-kajian ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlawanan WALHI terhadap Rencana Pembangunan PLTN di Bangka Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta didukung oleh berbagai pemberitaan media, perlawanan yang dilakukan oleh WALHI Bangka Belitung terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu melalui advokasi kebijakan (audiensi), kampanye publik, serta pemanfaatan media sebagai alat mobilisasi opini.

Pertama, dalam bentuk advokasi langsung, WALHI secara aktif melakukan audiensi dengan pihak pemerintah dan Lembaga legislative daerah. Hal ini terlihat dari keterlibatan WALHI Bersama masyarakat dalam menyampaikan penolakan secara langsung kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam forum tersebut, WALHI menegaskan bahwa pembangunan PLTN tidak memiliki urgensi yang jelas bagi daerah, serta dinilai memiliki risiko tinggi baik dari sisi lingkungan maupun keselamatan masyarakat (TopBabel.com, 2025). Temuan ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa WALHI memilih jalur formal sebagai strategi untuk memengaruhi kebijakan public dan menghentikan proyek sejak tahap perencanaan.

Kedua, WALHI juga melakukan perlawanan melalui kampanye dan Gerakan public. Kampanye ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak seperti nelayan dan warga pesisir. Dalam berbagai kesempatan, WALHI menyoroti potensi kerusakan ekologis yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan PLTN, seperti ancaman terhadap ekosistem laut, sumber mata pencaharian masyarakat, serta dampak jangka Panjang yang sulit dipulihkan (Saputra, 2025).

Ketiga, bentuk perlawanan yang cukup dominan adalah melalui media, baik media massa maupun media social. WALHI secara konsisten menyampaikan narasi penolakan melalui berbagai pemberitaan, termasuk dengan mengkritisi klaim-klaim yang mendukung pembangunan PLTN. Misalnya, WALHI menolak hasil survei yang menyatakan mayoritas masyarakat mendukung PLTN, karena dianggap tidak transparan dan berpotensi menyesatkan publik (Beritalain.id, 2026). Selain itu, sejak awal rencana pembangunan PLTN, WALHI juga telah menyampaikan berbagai

alasan penolakan, seperti ketergantungan pada pihak asing, biaya yang tinggi, dan potensi korupsi, serta risiko bahaya nuklir bagi manusia dan lingkungan (detikNews, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa media digunakan sebagai alat untuk membentuk opini public sekaligus menekan pemerintah agar mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, bentuk perlawanan WALHI terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah menunjukkan pola Gerakan social yang terorganisir dan multi-strategi. Tidak hanya mengandalkan aksi lapangan, tetapi juga memanfaatkan jalur kelembagaan dan ruang public untuk memperkuat posisi penolakan. Kombinasi antara advokasi kebijakan, mobilisasi masyarakat, dan produksi wacana di media menjadi kekuatan utama WALHI dalam menentang proyek PLTN di Bangka Belitung.

Jika dikaitkan dengan perspektif politik ekstra parlementer, seluruh bentuk perlawanan yang dilakukan oleh WALHI tersebut dapat dipahami sebagai praktik nyata dari aktivitas politik di luar jalur formal parlemen. Dalam konteks ini, WALHI tidak memiliki kekuasaan legislasi secara langsung, namun tetap mampu mempengaruhi arah kebijakan public melalui tekanan dari luar sistem pemerintahan. Hal ini terlihat dari bagaimana WALHI memanfaatkan berbagai ruang non-formal seperti aksi kampanye, mobilisasi masyarakat, hingga produksi opini public untuk menekan pemerintah agar mempertimbangkan ulang rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah.

Lebih lanjut, peran WALHI sebagai aktor ekstra parlementer juga tampak dari kemampuannya dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan ruang-ruang pengambilan kebijakan. Meskipun tidak berada di dalam struktur kekuasaan, WALHI tetap masuk ke arena politik melalui audiensi dengan DPRD dan pemerintah daerah. Namun, yang membedakan adalah posisi WALHI yang tetap independen dan kritis, sehingga tidak terikat pada kepentingan politik praktis sebagaimana aktor-aktor di dalam parlemen. Dalam hal ini, WALHI menjalankan fungsi representasi alternatif, yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang belum tentu terakomodasi secara optimal oleh Lembaga legislatif.

Selain itu, dalam kerangka politik ekstra parlementer, bentuk perlawanan yang digunakan WALHI juga menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan konvensional dan non-konvensional. Pendekatan konvensional terlihat dari upaya audiensi dan penyampaian aspirasi secara formal, sementara pendekatan non-konvensional tampak dari kegiatan kampanye, aksi penolakan, serta penggunaan media untuk membangun tekanan publik. Kombinasi ini menjadi ciri khas gerakan ekstra parlementer yang berupaya memaksimalkan berbagai saluran di luar parlemen untuk mencapai tujuan politiknya.

Di sisi lain, keberadaan WALHI sebagai aktor ekstra parlementer juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, tidak semua kepentingan dapat sepenuhnya diakomodasi oleh lembaga formal, sehingga dibutuhkan aktor-aktor di luar parlemen yang mampu mengawasi, mengkritisi, dan memberikan alternatif pandangan. Dalam kasus penolakan PLTN di Bangka Tengah, WALHI berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan ekonomi, tetapi juga

mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat lokal.

Selain itu, perlawanan yang dilakukan WALHI juga mencerminkan bagaimana kekuatan politik tidak selalu harus berasal dari institusi formal. Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif ekstra parlementer, WALHI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi lingkungan, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan publik di luar jalur parlemen. Perlawanan terhadap pembangunan PLTN di Bangka Tengah menjadi salah satu contoh bagaimana gerakan ekstra parlementer dapat berperan dalam dinamika kebijakan publik, sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan melalui institusi formal, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat sipil di luar parlemen.

Strategi Politik Ekstraparlementer WALHI dalam Advokasi Penolakan Pembangunan PLTN di Bangka Tengah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan salah satu organisasi lingkungan hidup yang aktif melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, WALHI Babel memperlihatkan praktik politik ekstraparlementer melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial, pembentukan opini publik, serta tekanan politik terhadap pemerintah dan korporasi. Politik ekstraparlementer sendiri dipahami sebagai aktivitas politik yang dilakukan di luar lembaga formal negara melalui gerakan sosial, aksi kolektif, dan mobilisasi masyarakat sipil (Tarrow, 1998).

Strategi politik ekstraparlementer yang dilakukan WALHI tampak sejak munculnya wacana pembangunan PLTN di Bangka Belitung pada tahun 2011. Dalam pemberitaan (detikNews, 2011), WALHI Babel secara tegas menyampaikan penolakan terhadap pembangunan PLTN dengan mengemukakan lima alasan utama, yaitu ketergantungan terhadap pihak asing, tingginya biaya pembangunan yang membebani rakyat, potensi bahaya radiasi nuklir, peluang terjadinya korupsi, serta pandangan bahwa energi nuklir bukan merupakan pilihan utama sebelum energi terbarukan dimaksimalkan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa WALHI membangun kritik tidak hanya pada aspek teknis pembangunan PLTN, tetapi juga terhadap dimensi ekonomi-politik dan ekologis yang menyertainya. Menurut Ulrich Beck dalam teori risk society, modernisasi industri melahirkan berbagai risiko global baru, termasuk ancaman teknologi nuklir yang berdampak terhadap keselamatan manusia dan lingkungan (Beck, 1992).

Argumentasi WALHI tersebut menunjukkan adanya konstruksi narasi politik lingkungan yang menempatkan nuklir sebagai ancaman ekologis, ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif gerakan sosial, strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk framing process, yaitu upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap suatu persoalan publik. Menurut David Snow dan Robert Benford, framing merupakan proses pembentukan makna yang dilakukan aktor gerakan sosial untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu isu sosial-politik (Benford & Snow, 2000). Melalui framing tersebut, WALHI berusaha membentuk opini publik

bahwa pembangunan PLTN bukanlah solusi energi yang mendesak bagi Bangka Belitung.

Pada perkembangan selanjutnya, praktik politik ekstraparlementer WALHI semakin terlihat dalam penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN oleh PT Thorcon Indonesia di Bangka Tengah tahun 2025. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, WALHI Babel bersama masyarakat dan kelompok sipil lainnya secara aktif menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut. Direktur Eksekutif WALHI Babel, Ahmad Subhan Hafiz, mempertanyakan urgensi pembangunan PLTN di Bangka Belitung dengan menyoroti bahwa daerah tersebut tidak berada dalam kondisi darurat energi (BeritaCMM.COM, 2025). Selain itu, WALHI juga mengkritik klaim perusahaan mengenai keamanan teknologi nuklir yang digunakan karena teknologi tersebut dinilai belum diterapkan secara luas secara global. WALHI juga menyoroti tingginya risiko PLTN, kebutuhan air yang besar, serta ancaman terhadap kawasan konservasi dan masyarakat pesisir di Bangka Tengah (BeritaCMM.COM, 2025). Kritik tersebut memperlihatkan bahwa WALHI berupaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap dominasi wacana pembangunan yang dibangun negara dan korporasi.

Strategi tersebut menunjukkan adanya praktik counter-expertise atau produksi pengetahuan tandingan terhadap klaim negara dan korporasi. Menurut (Fischer, 2000), kelompok masyarakat sipil sering membangun pengetahuan alternatif untuk menantang legitimasi teknokratis negara dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks ini, WALHI berupaya mendekonstruksi legitimasi pembangunan PLTN dengan menghadirkan argumen mengenai tingginya risiko nuklir, kebutuhan air yang besar, ancaman terhadap kawasan konservasi, serta belum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana disampaikan dalam forum RDP bersama DPRD Babel (BeritaCMM.COM, 2025). Strategi ini memperlihatkan bahwa gerakan lingkungan tidak hanya bergerak melalui aksi massa, tetapi juga melalui pertarungan pengetahuan dan legitimasi ilmiah.

Selain membangun wacana penolakan, WALHI juga menerapkan strategi mobilisasi sosial dengan melibatkan masyarakat lokal, terutama masyarakat pesisir Batu Beriga yang berpotensi terdampak langsung oleh pembangunan PLTN. Keterlibatan masyarakat lokal menunjukkan bahwa WALHI berupaya membangun gerakan berbasis akar rumput (grassroots movement) sebagai instrumen tekanan politik di luar jalur formal parlemen. Menurut Sidney Tarrow, gerakan sosial akan efektif ketika mampu memanfaatkan peluang politik (political opportunity structure) melalui pembentukan jaringan sosial dan dukungan publik yang luas (Tarrow, 1998). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat legitimasi gerakan penolakan PLTN di Bangka Tengah.

Praktik politik ekstraparlementer WALHI juga terlihat melalui pemanfaatan media massa sebagai sarana advokasi. Publikasi penolakan PLTN melalui media nasional dan lokal menjadi strategi penting dalam membangun opini publik serta memperluas dukungan masyarakat terhadap gerakan penolakan tersebut. Media dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi wacana antara kelompok masyarakat sipil dengan negara dan korporasi. Menurut (Habermas, 1990), ruang publik yang dibentuk melalui

media dapat menjadi arena deliberasi masyarakat dalam mengkritik kebijakan negara dan kepentingan ekonomi-politik yang dominan. Dalam kasus ini, media seperti detikcom dan Berita CMM menjadi ruang artikulasi penolakan WALHI terhadap pembangunan PLTN.

Lebih lanjut, penolakan WALHI terhadap pembangunan PLTN juga menunjukkan pendekatan environmental justice atau keadilan lingkungan. WALHI menempatkan masyarakat lokal dan keberlanjutan ekologis sebagai aspek utama yang harus diprioritaskan dalam proses pembangunan. Penolakan terhadap pembangunan PLTN di kawasan konservasi dan wilayah pesisir Bangka Tengah memperlihatkan adanya upaya mempertahankan ruang hidup masyarakat dari potensi kerusakan lingkungan akibat proyek industri berisiko tinggi. Menurut Joan Martinez-Alier, konflik lingkungan sering muncul akibat benturan antara kepentingan investasi dengan keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal (Martinez-Alier, 2002). Hal tersebut terlihat dari penolakan WALHI dan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di kawasan konservasi laut Pulau Kelasa yang dinilai berpotensi merusak lingkungan pesisir Bangka Belitung (BeritaCMM.COM, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi politik ekstraparlementer WALHI dalam advokasi penolakan pembangunan PLTN di Bangka Tengah dilakukan melalui pembentukan framing isu lingkungan, mobilisasi masyarakat akar rumput, penggunaan media massa, produksi pengetahuan tandingan, serta tekanan politik terhadap pemerintah dan korporasi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa gerakan lingkungan hidup tidak hanya beroperasi dalam ruang formal politik, tetapi juga melalui berbagai bentuk gerakan sosial yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik dan mempertahankan kepentingan ekologis masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap rencana pembangunan PLTN di Bangka Tengah menunjukkan praktik gerakan sosial lingkungan yang terorganisir dan berbasis politik ekstra-parlementer. Perlawanan tersebut tidak hanya dilakukan melalui aksi penolakan secara langsung, tetapi juga melalui advokasi kebijakan, kampanye publik, mobilisasi masyarakat, serta pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana membangun opini publik. Strategi ini memperlihatkan bahwa WALHI berupaya mempengaruhi kebijakan publik di luar jalur formal parlemen dengan menempatkan masyarakat sipil sebagai kekuatan politik alternatif dalam demokrasi.

Dalam praktiknya, WALHI mengonstruksi strategi politik ekstra-parlementer melalui beberapa pendekatan utama, yaitu framing isu lingkungan, produksi pengetahuan tandingan (counter-expertise), mobilisasi masyarakat akar rumput, dan tekanan politik terhadap pemerintah maupun korporasi. Melalui framing tersebut, WALHI membangun narasi bahwa pembangunan PLTN tidak hanya mengandung risiko ekologis, tetapi juga menghadirkan ancaman sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, WALHI juga memanfaatkan ruang publik dan media untuk mendekonstruksi legitimasi pembangunan yang dibangun oleh

negara dan perusahaan, khususnya terkait klaim keamanan teknologi nuklir dan urgensi kebutuhan energi di Bangka Belitung.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi politik ekstra-parlementer WALHI tidak hanya bertumpu pada aksi demonstrasi, melainkan menggabungkan pendekatan konvensional dan non-konvensional. Audiensi dengan DPRD dan pemerintah daerah menjadi bentuk pendekatan formal, sementara kampanye publik, penguatan jaringan masyarakat pesisir, dan produksi opini melalui media menjadi bentuk tekanan politik non-formal. Kombinasi strategi tersebut memperlihatkan kemampuan WALHI dalam membangun legitimasi gerakan sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat terdampak dalam menghadapi proyek pembangunan berskala besar.

Lebih jauh, keberadaan WALHI dalam penolakan PLTN di Bangka Tengah menegaskan pentingnya organisasi masyarakat sipil sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pembangunan negara. WALHI hadir sebagai representasi alternatif bagi kepentingan masyarakat lokal yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, gerakan penolakan PLTN tidak hanya mencerminkan konflik pembangunan dan lingkungan, tetapi juga menunjukkan dinamika demokrasi di mana masyarakat sipil berperan aktif dalam mengawasi, mengkritisi, dan mempengaruhi arah kebijakan publik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa strategi politik ekstra-parlementer yang dipraktikkan WALHI dalam advokasi penolakan pembangunan PLTN di Bangka Tengah merupakan bentuk perjuangan politik lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat, produksi wacana kritis, dan penguatan solidaritas sosial. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak selalu berasal dari institusi formal negara, melainkan juga dapat tumbuh melalui gerakan masyarakat sipil yang mampu membangun tekanan publik dan memperjuangkan keadilan lingkungan secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R. (2022). *Kuasa Padat Modal: Strategi Elektoral Partai dalam Sistem Liberal*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wKJfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Men+empatkan+politik+ekstra+parlementer+sebagai+pilihan+strategi+menunjukkan+bahwa+gerakan+kolektif+yang+dibangun+masyarakat+sipil+tidak+selalu+bergantung+pada+jalur+formal+di+lembaga+legislatif&ots=7RRomCQF34&sig=KMheKjyHCcB2975Jp01fpSx6vno&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. SAGE.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). *Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment*. *Annual Reviews*. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.soc.26.1.611/>
- BeritaCMM.COM. (2025, November 11). WALHI & DPRD: Tak Ada Urgensi Bangun PLTN di Bangka Belitung, Resikonya Besar! <https://beritacmm.com/2025/11/11/walhi-dprd-tak-ada-urgensi-bangun-pltn-di-bangka-belitung-resikonya-besar/>
- Beritalain.id. (2026). Tolak PLTN Thorcon , Walhi Babel: Survei UNS Gejala Keruntuhan Integritas Akademik. <https://www.beritalain.id/detailpost/tolak-pltn-thorcon-walhi-babel-survei-uns-gejala-keruntuhan-integritas-akademik>

- Darmawan, B. (2023). Kontestasi Wacana PLTN Thorium Pulau Gelasa: Antara Pembangunan, Kerusakan Ekologi, dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(2), 66–82. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.109>
- detikNews. (2011). *Walhi Babel Tolak PLTN di Bangka Belitung*. <https://news.detik.com/berita/d-1594748/walhi-babel-tolak-pltn-di-bangka-belitung>
- Fischer, F. (2000). *Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge*. Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11smwd9>
- Habermas, J. (1990). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. 27(07), 27-4175-27-4175. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.27-4175>
- Huntington, S. P., Nelson, J., & Simamora, S. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta. (Jakarta). http://perpustakaan.kemlu.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1298
- Kanugraha, S. C. (2025). Peran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai Katalis Foreign Direct Investment (FDI) pada Sektor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2477–2488. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4648>
- Kurniawan, T. A., Kuntjoro, Y. D., Yoesgiantoro, P., & Nugroho, H. S. (2024). Impact of Social Movements on Renewable Energy Policy in Indonesia: Study of Solar Power Plants. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1100>
- Liputan6. (2024). *Mengenal WALHI Adalah Organisasi Lingkungan Terbesar di Indonesia*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5775521/mengenal-walhi-adalah-organisasi-lingkungan-terbesar-di-indonesia>
- Martinez-Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the Poor*. <https://www.elgaronline.com/monobook/9781840649093.xml>
- Muhammad, A. F., Sanre, N., & Nasrahbilla, A. W. (2025). Strategi Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing di Pasar Internasional. *Jurnal Interdisipliner*, 2(1), 28–37.
- Rizqi, A. K. (2024). *GERAKAN POLITIK EKSTRA PARLEMENTER KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) SOLO, 1998-2009 M* [Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73498/>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Saputra, R. (2025). Gejala di Bangka Belitung! WALHI Bongkar Ancaman Lingkungan di Balik Ambisi Proyek PLTN Pulau Gelasa. *Info Bangka*. <https://bangkaselatan.pikiran-rakyat.com/bangka-belitung/pr-3639783154/gejolak-di-bangka-belitung-walhi-bongkar-ancaman-lingkungan-di-balik-ambisi-proyek-pltn-pulau-gelasa>
- SISTA, S. N. P. F. (2024). *IMPLIKASI PENETAPAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI (WPPI) TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI LAMPUNG* [Masters, UNIVERSITAS LAMPUNG]. <https://digilib.unila.ac.id/82111/>
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813245>
- TopBabel.com. (2025). *Masyarakat Batu Beriga Bersama WALHI Menyampaikan Penolakan Pembangunan PLTN di Bangka Belitung Ke DPRD - TopBabel.com*. <https://topbabel.com/masyarakat-batu-beriga-bersama-walhi-menyampaikan-penolakan-pembangunan-pltn-di-bangka-belitung-ke-dprd/>
- Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau | JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN). *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1659>
- Wardana, A., & Darmawardana, D. A. (2024). Pembangunan Sebagai Proses Eksklusif: Kajian Proyek Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Strategi Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Kencana.